



Bias Modernisasi Pembangunan Dominan pada Proyek Pantai Indah Kapuk Dua (PIK 2) (Dampak terhadap Sosial dan Ekonomi Masyarakat)

Olivia Fitra Ilma Fadlila Humaida Habib^{1*}, Andi M. Faisal Bakti²

¹⁻² Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Magister Komunikasi Penyiaran Islam,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: oliviafitrailma@gmail.com

Abstract. *The development of Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) presents serious issues, including eviction, the loss of traditional livelihoods, and the marginalization of local communities within a modernization agenda that disregards social justice and sustainability. This research questions the extent to which the dominant modernization bias influences the socio-economic conditions of the surrounding community, as well as how public participation practices are implemented in the planning and execution of the project. The PIK 2 project has led to social inequality, the deprivation of rights, and environmental degradation, illustrating a pattern of systemic exploitation of coastal communities through the economic and political power of development elites. The dominant development theory framework proposed by Melkote and Steeves is used to examine modernization bias, supplemented by Islamic concepts such as mustadh'afin and ghasab to strengthen the social justice perspective. In this study, the author employs a qualitative case study approach, utilizing in-depth interviews, field observations, and documentation involving affected residents, community leaders, and policymakers. The results of the analysis indicate very low levels of public participation, instances of intimidation during land acquisition, and a significant loss of access to employment and basic facilities for the community. The conclusion of this research emphasizes the need for policy reform to ensure that development is more transparent, participatory, and equitable, in order to protect the rights of local communities from dominant and exploitative development patterns.*

Keywords: *Development Communication; Modernization Bias; PIK 2; Public Participation; Social Inequality.*

Abstrak. Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menghadirkan persoalan serius yang mana berupa penggusuran, penghilangan mata pencaharian tradisional, serta marginalisasi masyarakat lokal dalam agenda modernisasi yang mengabaikan keadilan sosial dan keberlanjutan. Dalam Penelitian ini mempertanyakan sejauh mana bias modernisasi pembangunan dominan memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar, serta bagaimana praktik partisipasi publik diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek tersebut. Proyek PIK 2 ini telah menyebabkan ketimpangan sosial, perampasan hak, dan kerusakan lingkungan, yang memperlihatkan bagaimana pola eksploitasi sistemik terhadap masyarakat pesisir dengan melalui kekuatan ekonomi dan politis elite pembangunan. Dalam kerangka teori pembangunan dominan yang disampaikan oleh Melkote dan Steeves digunakan untuk mengkaji bias modernisasi, ditambah dengan konsep keislaman seperti mustadh'afin dan ghasab guna untuk memperkuat perspektif keadilan sosial. Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan studi kasus kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara yang mendalam, observasi lapangan, serta dokumentasi terhadap warga yang terdampak, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan serta kesimpulan. Hasil analisis ini menunjukkan partisipasi dari publik yang sangat rendah juga intimidasi dalam pembebasan lahan yang terjadi serta masyarakat yang banyak kehilangan akses terhadap pekerjaan dan fasilitas dasar secara signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlu adanya reformasi kebijakan untuk pembangunan agar lebih transparan, partisipatif, dan adil demi untuk melindungi hak-hak milik masyarakat lokal dari dominasi pembangunan yang eksploitatif.

Kata kunci: Bias Modernisasi; Ketimpangan Sosial; Komunikasi Pembangunan; Partisipasi Publik; PIK 2.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menghadirkan dinamika yang kompleks antara agenda modernisasi dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Reklamasi yang dilakukan dalam proyek ini terbukti telah merusak mata pencaharian tradisional warga yang selama ini bergantung pada sektor kelautan dan pesisir (Waruwu,

2025). Selain itu, kerusakan ekosistem mangrove sebagai benteng alami terhadap banjir dan penopang keberlanjutan lingkungan semakin memperparah kondisi ekologis kawasan tersebut (Samudro & Hamdan, 2023). Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan serius antara orientasi pembangunan yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan kebutuhan pelestarian lingkungan dan budaya lokal (Rahman, 2023).

Di sisi lain, dominasi investor dalam proyek pembangunan turut membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas dasar yang sebelumnya dapat mereka nikmati secara bebas (Nufus, 2025). Transformasi kawasan menjadi wilayah hunian elit secara tidak langsung menciptakan eksklusivitas sosial, di mana warga lama semakin tersisih dari ruang hidupnya sendiri (Wibisana, 2025). Kondisi ini memperlebar jurang ketimpangan antara kelompok masyarakat lokal dengan kalangan elit ekonomi, sebagaimana juga disoroti dalam berbagai laporan media (Tempo, 2025a). Dengan demikian, pembangunan PIK 2 tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memicu stratifikasi sosial yang semakin tajam.

Lebih jauh, proyek ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial-ekonomi di wilayah pesisir apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang adil dan inklusif (Tempo, 2025b). Ketimpangan yang terus dibiarkan berisiko memicu konflik sosial sebagai akibat dari ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pembangunan yang cenderung eksploitatif (Setyowati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kepentingan elit sering kali mengabaikan hak-hak dasar masyarakat lokal, sehingga memperkuat dominasi struktur kekuasaan dalam proses pembangunan.

Dalam konteks tersebut, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memastikan adanya kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak, baik dalam bentuk finansial maupun penyediaan lahan pengganti (Kompas, 2025). Selain itu, upaya pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan dan pembukaan akses ekonomi baru menjadi langkah strategis untuk memulihkan kemandirian masyarakat pasca pembangunan (Waruwu, 2025; Nufus, 2025). Intervensi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab sosial, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Lebih luas lagi, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mengawasi jalannya proyek serta memastikan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berjalan secara optimal (Kompasiana, 2025). Pembukaan lapangan kerja baru dan penyediaan akses terhadap fasilitas publik harus menjadi prioritas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Latifah et al., 2024). Dalam perspektif

komunikasi pembangunan, sebagaimana dikemukakan oleh Bakti, masyarakat seharusnya ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, bukan sekadar objek dari kebijakan yang ditentukan secara sepihak (Bakti, 2000).

2. METODE

Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang akan dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2014). Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat local dan aktivis sekitar Kawasan Pembangunan PIK 2. Menurut Arikunto, objek penelitian adalah variabel yang menjadi inti problematika penelitian (Arikunto, 2014). Pada penelitian ini objek adalah dampak modernisasi membangun dominan terhadap masyarakat.

Sumber dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif, yang menurut Creswell bertujuan memahami makna fenomena sosial melalui data deskriptif dan naratif untuk memberikan pemahaman mendalam atas masalah kemanusiaan (Creswell & Creswell, 2014).

Data Primer: Data ini diperoleh langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Data Sekunder: Data ini diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel berita, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan.

Teknik Koleksi Data

Observasi: Peneliti secara langsung mengamati aktivitas di media sosial.

Wawancara mendalam: Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan masyarakat terdampak dan aktivis setempat.

Dokumentasi: Data dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen-dokumen terkait.

Verifikasi data

Validitas dan keandalan data dalam penelitian ini dijamin melalui proses triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan

Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menunjukkan bias kuat dari paradigma pembangunan modernisasi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, estetika ruang, dan hunian elite, tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Kawasan ini dibangun dengan pendekatan top-down dan cenderung mengabaikan konteks sosial, historis, dan ekologis masyarakat pesisir. Hal ini ditegaskan oleh Melkote & Steeves yang menyebut bahwa paradigma pembangunan dominan seringkali dikelola oleh elit teknokratik tanpa mendengarkan suara masyarakat marginal (Melkote & Steeves, 2008).

Aktivis advokasi Satya, yang aktif mendampingi warga di kawasan Teluk Naga, menyampaikan dalam wawancara “Dari awal, tidak ada konsultasi yang serius dengan warga. Semua keputusan ditentukan oleh pemilik modal. Pembangunan hanya berpihak pada estetika dan properti mahal, bukan kebutuhan masyarakat lokal.” (Wawancara Satya Graha, 2025). Berita Katadata (2024) menguatkan hal ini dengan melaporkan bahwa pembangunan PIK 2 menutup akses jalan warga melalui tembok dan pagar tinggi, yang membuat mobilitas masyarakat sekitar terhambat secara sistematis (Katadata, 2024).

Dampak sosial dari pembangunan PIK 2 tidak hanya berupa pengusuran fisik, melainkan relokasi secara halus (*soft displacement*). Dalam praktiknya, warga tidak diusir secara langsung, tetapi akses ke ruang hidup mereka seperti jalan menuju laut, tempat ibadah, dan fasilitas umum dipersempit. Jurnal karya Waruwu, mencatat bahwa perubahan ruang yang terjadi menyebabkan warga kehilangan koneksi sosial, identitas budaya pesisir, dan rasa memiliki terhadap kampung halaman mereka (Waruwu, 2025). Anwar, warga Kamal Muara yang telah tinggal di wilayah pesisir selama lebih dari 40 tahun, mengatakan “Kami tidak disuruh pindah, tapi jalan ke tempat biasa cari ikan ditutup. Mau tidak mau, kami mundur sendiri. Rasanya tidak lagi punya tempat di sini” (Wawancara Anwar, 2025). Laporan dari Republika juga menegaskan adanya desakan dari DPR untuk menghentikan proyek ini karena dugaan pelanggaran tata ruang dan penutupan akses terhadap wilayah pesisir publik (Republika, 2025).

Pembangunan PIK 2 memang menghasilkan pembukaan lapangan kerja dan peluang usaha, terutama di sektor konstruksi dan ritel. Data dari Panel Survei Indonesia (2025) mencatat bahwa lebih dari 160.000 lapangan kerja terbuka selama 2021–2024 (Suara Jakarta, 2025). Namun, hasil penelitian Waruwu menyebut bahwa mayoritas posisi strategis diisi oleh tenaga kerja luar, sementara warga lokal hanya mendapat pekerjaan kasar dan berjangka pendek (Waruwu, 2025). Anwar membenarkan temuan tersebut, ujarinya dalam wawancara “Orang luar kerja jadi supervisor, manajer, bagian gudang. Kami? Cuma dipakai saat angkut material atau jadi satpam. Setelah itu, ya balik lagi ke laut, kalau masih bisa” (Wawancara Anwar, 2025). SharedValueIndonesia juga menyoroti ketimpangan ekonomi ini, menyebut bahwa branding proyek sebagai “*eco-city*” menyembunyikan fakta bahwa masyarakat lokal tidak mendapat akses adil terhadap keuntungan proyek (Shared Value Indonesia, 2025).

Reklamasi besar-besaran untuk PIK 2 merusak ekosistem mangrove dan kawasan pesisir yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama nelayan. Jurnal oleh Ghanie et al. (2022) mencatat bahwa reklamasi mengakibatkan sedimentasi tinggi, hilangnya keanekaragaman hayati laut, dan perubahan arus yang mengurangi hasil tangkapan nelayan (Wijayanti et al., 2022). Satya menjelaskan bahwa hilangnya daerah tangkap menyebabkan lonjakan pengangguran terselubung di kalangan nelayan “Banyak nelayan yang sekarang jualan kopi atau jadi buruh bangunan, bukan karena mau, tapi karena lautnya sudah mati” (Wawancara Satya Graha, 2025). Berita dari Erakini.id menambahkan bahwa Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam perizinan reklamasi dan banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan hak atas laut dan pantai (Erakini, 2025).

Pembangunan PIK 2 menimbulkan disrupsi sosial dan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Warga kehilangan akses ke laut, ruang publik, dan mengalami pemisahan sosial akibat pemagaran wilayah. Waruwu mencatat adanya relokasi tidak langsung yang mengganggu ekonomi lokal warga pesisir. Anwar, warga Teluk Naga, menyebut, “Kami kehilangan tempat kerja dan ruang hidup. Sekarang harus muter jauh hanya untuk ke laut.” Satya menambahkan bahwa warga menjadi penonton di tengah proyek besar yang tak mereka nikmati hasilnya (Wawancara Satya Graha, 2025).

Praktik perizinan dan partisipasi publik dalam proyek PIK 2 juga menjadi titik penting yang mempengaruhi kesejahteraan dan mobilitas warga lokal. Proyek ini menggunakan kerangka hukum Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurut laporan justru sering digunakan untuk mempercepat perizinan tanpa memastikan partisipasi warga terdampak secara substansial (Erakini, 2025). Satya menyoroti bahwa, “PSN bukan hanya mempercepat pembangunan, tapi juga mempersempit ruang kontrol warga terhadap pembangunan yang memengaruhi hidup mereka langsung” (Wawancara Satya Graha, 2025). Proses konsultasi publik yang seharusnya menjadi hak warga, menurutnya, seringkali hanya formalitas atau sekadar pemberitahuan, bukan proses deliberatif. Akibatnya, seperti diakui Anwar, warga tidak tahu jalur formal untuk menyampaikan keberatan, apalagi menuntut hak atas ruang dan penghidupan yang hilang. Mobilitas warga pun menurun: jalan ke laut diblok, transportasi berubah arah, dan sebagian nelayan akhirnya harus menyewa kapal motor untuk menjangkau titik tangkap baru yang lebih jauh biaya produksi pun meningkat (Wawancara Anwar, 2025). Ini menunjukkan bahwa ketiadaan partisipasi publik berdampak langsung terhadap ekonomi rumah tangga warga dan akses mereka terhadap sumber daya alam.

Dominasi paradigma modernisasi dalam proyek PIK 2 tetap kuat meskipun berbagai dampak negatif telah banyak dipersoalkan oleh masyarakat sipil dan warga terdampak. Hal ini tak lepas dari kuatnya relasi antara kepentingan ekonomi-politik dan simbolisme pembangunan sebagai representasi kemajuan. Seperti dijelaskan oleh Melkote dan Steeves, pembangunan modern seringkali dijadikan alat untuk mempertahankan kontrol simbolik dan ekonomi oleh elite negara dan pasar global, yang kemudian dipaksakan sebagai bentuk universal “kemajuan” (Melkote & Steeves, 2015). Satya menyebut pembangunan ini mementingkan beton, bukan kehidupan. Meski ada protes warga, proyek tetap berjalan karena orientasi negara lebih condong menjual tanah ke investor daripada melindungi komunitas lokal. Dominasi modernisasi bukan karena tak ada alternatif, melainkan karena kebijakan dan produksi pengetahuan masih dikuasai elit bukan berangkat dari akar rumput (Bakti, 2003).

Diskusi

Teori Biases of the Dominant development

Penelitian pertama yang relevan adalah studi oleh **Reuwih Diah Fitri Yani** berjudul “**Urban Bias Sebagai Perangkap Keterbelakangan pembangunan Desa**”. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif interpretatif dengan **teori Urban Bias ala Lipton dan Bates** dan metode kualitatif (analisis literatur & dokumen kebijakan), subjeknya adalah masyarakat desa dan objeknya adalah perangkap keterbelakangan pembangunan. Hal menunjukkan bahwa kecenderungan pembangunan yang mengutamakan kota justru menindas potensi desa dan memperdalam kesenjangan sosial-ekonomi (Yani, 2018). Temuan ini relevan dengan PIK 2 karena menggambarkan bagaimana modernisasi yang berfokus pada urban elit dapat mengabaikan kebutuhan lokal masyarakat sekitar.

Penelitian kedua yang relevan adalah jurnal oleh **Tambusay & Harahap** dalam studi “**Fenomena Migrasi dan Urban Bias dalam Konteks Indonesia**”, para peneliti menerapkan **teori Urban Bias** dan menggunakan paradigma konstruktivis dan metode studi pustaka untuk menelusuri migrasi akibat urbanisasi yang tidak seimbang. Subjek dalam menelitiannya masyarakat Indonesia dan objeknya adalah fenomena migrasi dari desa ke kota. Mereka menemukan bahwa pemusatan pembangunan di kota menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial di desa (Tambusay et al., 2024). Ini sangat paralel dengan dinamika di PIK 2, di mana pembangunan modernisasi menekan kearifan lokal dan akses ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian ketiga yang relevan oleh **Dominicus Savio Dkk** yang berjudul “**Determinan Kesenjangan Kemiskinan Desa-Kota Di Indonesia**” Paradigma penelitian ini kualitatif kebijakan dengan **teori Urban Bias**, menggunakan analisis dokumen dan kebijakan desa

seputar pembangunan infrastruktur pedesaan. Fokusnya adalah efektivitas intervensi pembangunan desa sebagai respons terhadap bias pembangunan urban yang menyebabkan ketimpangan wilayah (Somantri, 2022). Relevansinya terhadap PIK 2 terletak pada kebutuhan pendekatan bottom-up yang mempertimbangkan potensi lokal-salah satu solusi untuk mengurangi bias modernisasi yang ada.

Ketiga penelitian ini memberikan wawasan mengenai bias dapat menyebabkan ketimpangan sosial-ekonomi.

Consequences of The Dominant Paradigm of Development

Penelitian pertama yang relevan oleh **Allya Salsa Baitul Kh dkk.** berjudul **“Moderenisasi Melalui Pembangunan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”**. Penelitian etnografi dengan paradigma kritis ini meneliti komunitas adat yang dipindahkan paksa selama dua dekade menggunakan observasi lapangan dan wawancara mendalam. Fokusnya pada bagaimana pemindahan tersebut memperparah kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, dengan subjek meliputi warga terdampak dan pemangku kepentingan (Kh et al., 2024). Temuan menunjukkan bahwa modernisasi skala besar seperti di PIK 2 berpotensi menimbulkan kesenjangan ekonomi, kehilangan mata pencaharian, dan disrupsi sosial lokal.

Penelitian kedua Oleh **Myla Dyan Andini, dkk.** berjudul **“The Peri-Urban Gentrification Process in Cisauk Busdistrict, Tangerang Regency, Indonesia”**. Penelitian dengan paradigma kritis dan **teori gentrifikasi peri-urban** ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dan analisis perubahan penggunaan lahan di wilayah Cisauk. Fokus pada pengaruh pembangunan peri-urban terhadap aspek sosial, ekonomi, dan struktur komunitas masyarakat lokal. Hasilnya menunjukkan gentrifikasi menyebabkan konversi lahan, kenaikan harga properti, serta gangguan terhadap mata pencaharian warga, sementara minimnya kompensasi memperparah kerentanan sosial (Andini et al., 2023). kondisi yang serupa dengan situasi di PIK 2.

Penelitian ketiga oleh **Imam Buchori** yang berjudul **“Industrial Development-Induced Gentrification”** Penelitian paradigma kritis ini menggunakan teori **gentrifikasi** akibat pembangunan industri, memadukan metode analisis citra satelit, observasi lapangan, dan deskriptif kuantitatif berdasarkan 200 responden. Subjeknya adalah penduduk lokal dan migran, objeknya area industri di koridor Semarang-Bawen. Fokus pada dampak penggunaan lahan dan struktur sosial ekonomi lokal. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan industri cepat memicu suburbanisasi dan gentrifikasi naiknya harga lahan, pengusuran sosial-ekonomi, tetapi juga adaptasi masyarakat baru (Buchori et al., 2023). Relevansinya mirip dengan PIK 2, di mana modernisasi infrastruktur dapat meningkatkan nilai lahan dan

meminggirkan masyarakat asli.

Dari tiga penelitian tersebut Modernisasi cepat memicu gentrifikasi dan marginalisasi masyarakat lokal, seperti di PIK 2.

Sociological And Psychosocial Models Revisited

Penelitian pertama yang relevan adalah **“The Western And Non-Western Dichotomization Of Time In Anthropology”** oleh Muhammad A.Z. Mughal Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, dengan **teori dualitas modern-tradisional** dalam antropologi dan metode literature review sistematis yang menelaah artikel antropologis sebagai subjek dan narasi temporal mereka sebagai objek. Fokusnya pada bagaimana kerangka "tradisional vs modern" menyederhanakan waktu budaya non-Barat dan menghapus nuansa kontekstual. Hasil menunjukkan bahwa dikotomi temporal ini bersifat etnosentris dan menegasi keragaman perspektif budaya (Mughal, 2023). Relevansi Di PIK 2, bias modernisasi sering memosisikan masyarakat lokal sebagai "tradisional" pasif, padahal mereka memiliki dinamika budaya sendiri.

Penelitian kedua oleh **Muba Simanihuruk dkk.** Yang berjudul **“Negotiating Tradition and Modernity: A Case Study of Hybrid Political Cultures in Village Governance, North Tapanuli, Indonesia”** menggunakan paradigma kritis sosial dengan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi budaya, teori yang digunakan **adalah teori post-development theory (anti modernisasi)** subjeknya adalah pemerintah desa Nort Tapanuli dan objeknya adalah interaksi antara elite modern dan budaya tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah modernisasi sering mengabaikan sistem nilai lokal, memproduksi friksi dan resistensi budaya (Simanihuruk et al., 2023). Relevansi dalam penelitian penulis adalah Mendukung argumen bahwa modernisasi pembangunan menciptakan bias yang menganggap tradisi sebagai halangan, padahal masyarakat mampu menciptakan solusi hybrid yang lebih kontekstual.

Penelitian ketiga oleh **Aulia Arfida Paramita dkk.** Yang berjudul **“Path Dependency and Development Impacts of Megaproject: A Case Study of North Jakarta Bay Reclamation”** menggunakan paradigma Institutionalisi dengan metode Kualitatif dan kuantitatif, teori yang digunakan **adalah theory Path dependency (ketergantungan jalur pembangunan)** subjeknya adalah komunitas nelayan pesisir dan objeknya adalah Proyek reklamasi Jakarta Utara. Temuan Peningkatan nilai tanah akibat skema modernisasi menguntungkan investor, tapi menyingkirkan nelayan lokal (gentrifikasi) (Paramita et al., 2023). Model pembangunan modern memproyeksikan dominasi sistem nilai Barat.

4. KESIMPULAN

Refleksi

Penelitian saya mengenai pembangunan PIK 2 memperlihatkan adanya bias dalam cara pembangunan dirancang dan dijalankan. Masyarakat lokal, khususnya warga pesisir yang terdampak langsung, tidak dianggap sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, melainkan sebagai objek yang harus menyesuaikan diri dengan proyek yang diklaim membawa “kemajuan.” Hal ini sejalan dengan teori Bias dalam Paradigma Pembangunan Dominan, yang mengkritik kecenderungan pembangunan modern untuk mengesampingkan sejarah, budaya, dan kebutuhan riil masyarakat lokal demi mengejar tujuan universal seperti modernisasi dan industrialisasi. Dalam kasus PIK 2, proses pembangunan berjalan top-down dan minim melibatkan warga, memperkuat dominasi narasi teknokratik yang tidak berpijak pada realitas sosial masyarakat terdampak.

Dampak pembangunan PIK 2 terhadap masyarakat lokal menggambarkan konsekuensi nyata dari paradigma pembangunan dominan yang terlalu menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dan estetika kota modern. Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa warga yang telah lama tinggal dan menggantungkan hidup di wilayah pesisir mengalami penggusuran, kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, serta pemisahan dari jaringan sosial yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Teori *Consequences of the Dominant Paradigm of Development* menjelaskan bahwa pembangunan yang terlalu berpihak pada logika pasar dan investasi seringkali menyebabkan eksklusi sosial dan memperdalam ketimpangan. Refleksi ini menguatkan pemahaman saya bahwa pembangunan yang tidak adil secara sosial justru memperbesar jurang antara yang diuntungkan dan yang dikorbankan

Saya juga merefleksikan bahwa cara pandang terhadap masyarakat lokal dalam proyek PIK 2 sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang menyederhanakan keragaman budaya menjadi dikotomi “tradisional vs. modern.” Masyarakat pesisir diposisikan sebagai kelompok yang tertinggal dan perlu diubah agar sesuai dengan standar kota baru. Refleksi ini berangkat dari teori *Sociological and Psychosocial Models Revisited* yang mengkritik bagaimana teori evolusi sosial mengabaikan konteks lokal dengan memaksakan narasi tunggal tentang kemajuan. Dalam konteks penelitian saya, pandangan ini digunakan untuk membenarkan transformasi ruang hidup masyarakat menjadi kawasan elit yang steril dari unsur lokal. Hal ini membuat saya sadar bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut soal kekuasaan atas makna dan identitas.

Implikasi dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan PIK 2 merepresentasikan bias dalam paradigma pembangunan dominan yang cenderung mengabaikan konteks lokal masyarakat. Dalam proyek ini, modernisasi diutamakan, sementara sejarah, identitas, serta kebutuhan sosial dan budaya warga pesisir tidak dijadikan pertimbangan utama. Hal ini mencerminkan bahwa pembangunan tidak netral, melainkan sarat kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Temuan ini memperkuat kritik terhadap pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan estetika kota semata. Ketimpangan ruang, relokasi paksa, dan hilangnya akses terhadap ruang hidup menjadi konsekuensi nyata dari pembangunan yang tidak inklusif. Jika pola ini terus berlanjut, pembangunan hanya akan memperkuat ketidakadilan sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok yang diuntungkan dan yang dimarginalkan.

Oleh karena itu, secara teoritis dan praktis, penelitian ini memberi implikasi bahwa pembangunan harus direformulasi agar lebih responsif terhadap konteks sosial dan kultural masyarakat. Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari indikator ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan sosial.

Pemerintah dan pengembang perlu merancang pembangunan berbasis pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan. Keterlibatan ini harus dilakukan secara aktif dan setara, bukan hanya formalitas, agar suara warga benar-benar menjadi bagian dari arah pembangunan.

Akademisi dan peneliti disarankan untuk terus mengkritisi narasi besar pembangunan dengan lebih banyak mengeksplorasi suara warga terdampak. Penelitian lapangan yang memfokuskan pada pengalaman masyarakat lokal dapat memberikan perspektif alternatif terhadap wacana pembangunan yang selama ini terlalu teknokratis dan elitis.

Masyarakat sipil, LSM, dan komunitas lokal perlu memperkuat kapasitas advokasi serta memperluas jejaring solidaritas. Pendampingan hukum, pengorganisasian warga, dan penggunaan media bisa menjadi strategi untuk melawan ketimpangan yang muncul akibat pembangunan yang tidak adil. Kolaborasi lintas sektor penting agar perjuangan warga memiliki daya dorong politik yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, O. S. (2020). *Dari ekologi manusia ke ekologi politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Adeni, A., & Bakti, A. F. (2020). Reconceptualising the elements of Islamic propagation: Religious response and adaptation to new media. *Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2), 198–216.
- Adnan, Z. (2023). Methodology study hadith by Imam Bukhari. *Journal of Islamic Civilization and Thought*, 3(1), 15–32.
- Allaya Salsa Bilatul Kh, A., Sari, D. A. C., & Rangga, F. N. (2024). Modernisasi melalui pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(3), 65–75.
- Andini, M. D., Lestari, F., Medtry, M., & Karenina, A. (2023). The peri-urban gentrification process in Cisauk Subdistrict, Tangerang Regency, Indonesia. *Forum Geografi*, 37(1), 46–56.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bakti, A. F. (2003). *Communication and dakwah religious learning*.
- Bakti, A. F. (2005). *Mengkaji Islam sebagai objek ilmu pengetahuan: Tinjauan interdisipliner komunikasi*. Petra, 7(2).
- Bakti, A. F. (2006). *Majlis Az-Zikra: New approach to dakwah for civil society in Indonesia*. *Mimbar Jurnal Agama*, 23(1).
- Bakti, A. F. (2018). Media and religion: Rodja TV's involvement in the civil society discourse for community development. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 34(3), 226–244.
- Bakti, A. F., & Eka, V. (2014). Trendsetter komunikasi di era digital: Tantangan dan peluang pendidikan komunikasi dan penyiaran Islam. *Jurnal Komunikasi Islam*, 4(1), 22–26.
- Bakti, A. F., & Heryanto, G. G. (n.d.). *Daarut Tauhiid new approach to dakwah*.
- Bakti, A. F., & Lecomte, I. (2015). The integration of dakwah in journalism: Peace journalism. *Jurnal Komunikasi Islam*, 5(1), 1–19.
- Bakti, A. F., Anggraeni, D., Sarwoprasodjo, S., & Saleh, A. (2021). Gap komunikasi antargenerasi dalam pengelolaan radio komunitas di wilayah urban. *Jurnal Pikom*, 22(1), 87–102.
- Buchori, I., Zaki, A., Pang, P., Sejati, A. W., Basuki, Y., & Pramitasari, A. (2023). Industrial development-induced gentrification. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 11(1), 276–296.
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory*. Sage.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Escobar, A. (1995). *Encountering development*. Princeton University Press.
- Esteva, G. (1992). *Development*. In W. Sachs (Ed.), *The development dictionary: A guide to knowledge as power*. Zed Books.
- Farhan. (2014). *Bahasa dakwah struktural dan kultural da'i dalam perspektif dramaturgi*. At-

- Turas, 1(2), 268–288.
- Foucault, M. (2005). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings*. Library of Congress.
- Geertz, C. (1973). *The interpretation of cultures: Selected essays*. Basic Books.
- Hariri, M. R., et al. (2024). *Cakrawala dunia Arab: Paradigma holistik relasi politik, agama, dan budaya di Timur Tengah dan Afrika Utara (Vol. 1)*. Samudra Biru.
- Haspada, D., Asril, J., Faisal, R., Saputra, A. R., Herdiyanti, S. H., Gunati, M., & Mardiansah, S. (2025). Legal protection of coastal community rights in the development of the Indah Kapuk 2 beach area: An agrarian law perspective. *Jurnal Multidisipliner Madani*, 5(1), 70–79.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65, 19–51.
- Latifah, E., Handoko, P., Nugroho, A., & Yudistira, Y. (2024). Public policy analysis of the development of Pantai Indah. *Neo Journal Economy and Social Humanities*, 3(3), 236–244.
- Melkote, S. R., & Steeves, H. L. (2008). *Communication for development: Theory and practice for empowerment and social justice (3rd ed.)*. Sage Publication India Pvt Ltd.
- MOHAMMED, S. A., & IBRAHIM, M. (2023). Critique of the modernization theory's conceptions of underdevelopment: A theoretical approach. *Nnamdi Azikiwe Journal of Political Science*, 8(2), 113–129.
- Mughal, M. A. Z. (2023). The Western and non-Western dichotomization of time in anthropology. *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s41257-023-00086-z>
- Mulyadid. (2018). *Metodologi penelitian paradigma modernisasi dominan*.
- Nufus, S. (2025). Dampak pembangunan PIK 2 terhadap pelanggaran hak ekonomi sosial dan budaya masyarakat lokal. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(1), 14.
- Paramita, A. A., Winarso, H., Hudalah, D., & Syabri, I. (2023). Path dependency and development impacts of megaproject: A case study of North Jakarta Bay reclamation. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(11), 3477–3490.
- Robbins, P. (2012). *Political ecology: A critical introduction (2nd ed.)*. Wiley-Blackwell.
- Sachs, W. (Ed.). (1992). *The development dictionary: A guide to knowledge as power*. Zed Books.
- Samudro, A., & Hamdan. (2023). Analysis security, location, and word of mouth of the purchase decision for Pantai Indah Kapuk 2 housing. *Dinasti International Journal of Management Science*, 5(1), 44–56.
- Simanihuruk, M., Ismail, R., Sitorus, H., & Zuska, F. (2023). Negotiating tradition and modernity: A case study of hybrid political cultures in village governance, North Tapanuli, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(12), 3955–3963.
- Somantri, L. (2022). Pemetaan mobilitas penduduk di kawasan pinggiran Kota Bandung. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(2), 95–104.
- Tambusay, B. W., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Fenomena migrasi dan urban bias

dalam konteks Indonesia. *JEPP: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Pariwisata*, 4(1), 40–47.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development* (12th ed.). Pearson.

Waruwu, C. A. (2025). Kebijakan reklamasi Pantai Indah Kapuk 2: Dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat Kecamatan Teluk Naga. *E-Jurnal Undip Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1–23.

Wibisana, K. (2025). Kebijakan publik di Indonesia sebagai alat kepentingan kapitalis. *Jurnal Sosial dan Sains*, 5(5), 1230–1242.

Wijayanti, T. I., Mitasari, W., Nday, S. U., & Subandrio, A. (2022). Valuasi lingkungan melalui contingent valuation method (CVM) dalam revitalisasi Waduk Rowo Jombor Klaten. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 18(3), 283–295.

Yani, R. D. F. (2018). Urban bias sebagai perangkap keterbelakangan pembangunan desa. *Geomedia: Majalah Ilmiah dan Informasi Kegeografian*, 15(2), 193–204.

Yusfiaka, A., Hartati, E., & Nugraha, M. C. (2019). Hubungan perubahan tata guna lahan dengan debit air limpasan pada kawasan hunian Pantai Indah Kapuk 2. *Jurnal Serambi Engineering*, 5(1), 720–731.

Zahara, M. N., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2018). Tinjauan sosiologis fenomena ghasab di lingkungan pesantren dalam perspektif penyimpangan sosial. *Sosietas*, 8(1), 466–477.